



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 540 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.

**KETIGA** : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.

**KEEMPAT** : Semesta Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah klien pengawasan yang berpotensi untuk dilakukan pengawasan.

- KELIMA : Klien pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (Risk Based Audit Plan) dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2018.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Am Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 540 TAHUN 2018  
Tanggal 16 Maret 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN  
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan pemberian asurans (assurance) dan konsultansi (consulting) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans (assurance) dan konsultansi (consulting) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (systematic and disciplined approach) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian (control), meliputi :

- a. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (sustainable) melalui pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense);
- b. pelaksanaan asurans (assurance) yang fokus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi;
- c. pemberian konsultansi (consulting) untuk meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian;
- d. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- e. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM).

III. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

#### IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pengelolaan sumber daya daerah;
- d. pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara;
- h. penyelenggaraan SPIP; dan
- i. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

#### V. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management) dan pengendalian (control), dengan fokus meliputi :

##### A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

##### 1. Aspek Keuangan, dengan sasaran :

- a) Penerimaan Pendapatan Parkir
- b) Penerimaan Pajak Air Tanah
- c) Bantuan Hibah
- d) Dana BOP dan KJP untuk PAUD
- e) Arus Kas Rumah Sakit

##### 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran :

- a) Kendaraan Dinas Operasional
- b) Sarana Prasarana/fasilitas Komplek Balai Kota
- c) Prasarana dan sarana kerja di bidang komunikasi, informatika dan Statistik

- d) Prasarana dan sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- e) Pengamanan dan Pemanfaatan Properti
- f) Pembangunan jaringan air limbah
- g) Perjanjian Kerjasama dengan pihak ke III
- h) Rumah Susun
- i) Fasilitas Kesehatan
- j) Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :

- a) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- b) Pendayagunaan Hasil Pendidikan dan Pelatihan
- c) Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

4. Aspek Tugas dan Fungsi, dengan sasaran :

- a) Penertiban Papan Reklame
- b) Penyelenggaraan e-KTP dan SiDukun
- c) Distribusi dan pemakaian air minum
- d) Pelayanan Perparkiran
- e) Pelayanan KIR Online
- f) Pengembangan Kawasan Sentra Industri
- g) Pembinaan dan pengembangan UKM
- h) Sistem dan Prosedur Penerbitan Izin dan Non Izin
- i) Proses lelang
- j) Pengelolaan pompa air
- k) Pembangunan jalan dan kelengkapan jalan
- l) Pengelolaan Kebersihan Badan Air
- m) Penyediaan makanan bagi WBS pada Rumpun Anak, Rumpun Disabilitas dan Rumpun Psikotik
- n) Kinerja Pelayanan Kesehatan
- o) Penyaluran BOP PAUD terhadap TK Swasta
- p) Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di Dinas komunikasi, informatika dan Statistik
- q) Pengelolaan KJP Plus
- r) Pekerja Jasa Lainnya Perorangan
- s) Pemanfaatan Tenaga Ahli

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas (WBK dan WBM)

D. Kegiatan Reviu

- 1. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
- 2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
- 3. RKA dan RKBMD

E. Kegiatan Evaluasi

- 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana aksi KORSUPGAH
- 3. Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

#### F. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan
4. Pengendalian Gratifikasi
5. Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

#### G. Pengembangan Pengawasan

1. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan
2. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM
3. Pengembangan Sistem Manajemen Pengawasan
4. Peningkatan Kompetensi APIP (Auditor dan PPUPD)

### VI. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Hasil pengawasan intern dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Gubernur dan pemimpin klien pengawasan. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Klien pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan intern diterima.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-  
IBUKOTA JAKARTA,



*Baswedan*  
AMES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 540 TAHUN 2018

Tanggal 16 Maret 2018

SEMESTA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	SKPD/UKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakpus
3	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakpus
4	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakut
5	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakut
6	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakbar
7	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar
8	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel
9	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel
10	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim
11	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaktim
12	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten - Kep. Seribu
13	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - Jakpus
14	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - Jakbar
15	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - Jaksel
16	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - Jakut dan Kep. Seribu
17	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - Jaktim
18	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
19	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
20	Pusat Data Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
21	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin
22	Dinas Kesehatan
23	Suku Dinas Kesehatan Kota - Jakpus
24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus
25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus
26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus
27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus
28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus
29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus
30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus
31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus
32	Suku Dinas Kesehatan Kota - Jakut
33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut
34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut
35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut
36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut
37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut
39	Suku Dinas Kesehatan Kota - Jakbar
40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar
42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar
43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar
44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar
45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar



No.	SKPD/UKPD
46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar
47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar
48	Suku Dinas Kesehatan Kota - Jaksel
49	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel
50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel
51	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel
52	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
53	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel
54	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel
55	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel
56	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel
57	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel
58	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel
59	Suku Dinas Kesehatan Kota - Jaktim
60	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim
61	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim
62	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim
63	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
64	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim
65	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim
66	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
67	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim
68	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim
69	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim
70	Suku Dinas Kesehatan Kota - Kep. Seribu
71	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu
72	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu
73	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
74	Laboratorium Kesehatan Daerah
75	Akademi Keperawatan Jayakarta
76	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
77	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu
78	Rumah Sakit Umum Daerah Koja
79	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
80	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng
81	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
82	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
83	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit
84	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu
85	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran
86	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
87	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih
88	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
89	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu
90	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
91	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan
92	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
93	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres
94	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa

No.	SKPD/UKPD
95	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
96	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan
97	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
98	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
99	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas
100	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
101	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari
102	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok
103	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang
104	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
105	Dinas Bina Marga
106	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus
107	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut
108	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar
109	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel
110	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim
111	Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga
112	Unit Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga
113	Unit Pengadaan Tanah Bina Marga
114	Dinas Sumber Daya Air
115	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jakpus
116	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jakut
117	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jakbar
118	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jaksel
119	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jaktim
120	Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kep Seribu
121	Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
122	Unit Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air
123	Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air
124	Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air
125	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
126	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota - Jakpus
127	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota - Jakut
128	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota - Jakbar
129	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota - Jaksel
130	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota - Jaktim
131	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten - Kep. Seribu
132	Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
133	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
134	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jakpus
135	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jakut
136	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jakbar
137	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jaksel
138	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim
139	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu
140	Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan
141	Unit Pengelola Rumah Susun Marunda
142	Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru
143	Unit Pengelola Rumah Susun Cakung Barat
144	Unit Pengelola Rumah Susun Tambora

No.	SKPD/UKPD
145	Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek
146	Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang
147	Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari
148	Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang
149	Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok
150	Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum
151	Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat
152	Unit Pengelola Rumah Susun Semper
153	Satuan Polisi Pamong Praja
154	Satuan Polisi Pamong Praja Kota - Jakpus
155	Satuan Polisi Pamong Praja Kota - Jakut
156	Satuan Polisi Pamong Praja Kota - Jakbar
157	Satuan Polisi Pamong Praja Kota - Jaksel
158	Satuan Polisi Pamong Praja Kota - Jaktim
159	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten - Kep. Seribu
160	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
161	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota - Jakpus
162	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota - Jakut
163	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota - Jakbar
164	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota - Jaktim
165	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota - Jaksel
166	Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan
167	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
168	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
169	Pusat Data dan Informasi Kebencanaan
170	Dinas Sosial
171	Suku Dinas Sosial Kota - Jakpus
172	Suku Dinas Sosial Kota - Jakut
173	Suku Dinas Sosial Kota - Jakbar
174	Suku Dinas Sosial Kota - Jaksel
175	Suku Dinas Sosial Kota - Jaktim
176	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa
177	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1
178	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2
179	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3
180	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4
181	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya
182	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1
183	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2
184	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3
185	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4
186	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti
187	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin
188	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1
189	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2
190	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3
191	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih
192	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1
193	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2

No.	SKPD/UKPD
194	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya
195	Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih
196	Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah
197	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia
198	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
199	Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari
200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
201	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - Jakpus
202	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - Jakut
203	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - Jakbar
204	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - Jaksel
205	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - Jaktim
206	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus
207	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakut
208	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakbar
209	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel
210	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim
211	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las
212	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri
213	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
214	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
215	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
216	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jakpus
217	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jakut
218	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jakbar
219	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jaksel
220	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jaktim
221	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Kab. Adm - Kep. Seribu
222	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
223	Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana
224	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
225	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota - Jakpus
226	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota - Jakut
227	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota - Jakbar
228	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota - Jaksel
229	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota - Jaktim
230	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten - Kep. Seribu
231	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
232	Unit Pengelola Pelabuhan dan Perikanan
233	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
234	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
235	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
236	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
237	Dinas Lingkungan Hidup
238	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota - Jakpus
239	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota - Jakut
240	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota - Jakbar
241	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota - Jaksel
242	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota - Jaktim

No.	SKPD/UKPD
243	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Kep. Seribu
244	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
245	Unit Pengelola Sampah Terpadu
246	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
247	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
248	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota - Jakpus
249	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota - Jakut
250	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota - Jakbar
251	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota - Jaksel
252	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota - Jaktim
253	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten - Kep.Seribu
254	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan
255	Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan
256	Dinas Perhubungan
257	Suku Dinas Perhubungan Kota - Jakpus
258	Suku Dinas Perhubungan Kota - Jakut
259	Suku Dinas Perhubungan Kota - Jakbar
260	Suku Dinas Perhubungan Kota - Jaksel
261	Suku Dinas Perhubungan Kota - Jaktim
262	Suku Dinas Perhubungan Kabupaten - Kep. Seribu
263	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan
264	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan
265	Unit Pengelola Angkutan Sekolah
266	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
267	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
268	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke
269	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa
270	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung
271	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng
272	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing
273	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
274	Unit Pengelola Perparkiran
275	Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan
276	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
277	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota - Jakpus
278	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota - Jakut
279	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota - Jakbar
280	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota - Jaksel
281	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota - Jaktim
282	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten - Kep.Seribu
283	Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik
284	Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi
285	Pusat Pelayanan Statistik
286	Unit Pengelola Jakarta Smart City
287	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan
288	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota - Jakpus
289	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota - Jakut
290	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota - Jakbar
291	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota - Jaksel
292	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota - Jaktim

No.	SKPD/UKPD
293	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulo Gadung
294	Unit Pengelola Metrologi
295	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan
296	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
297	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota - Jakpus
298	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota - Jakut
299	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota - Jakbar
300	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota - Jaksel
301	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota - Jaktim
302	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Kep. Seribu
303	Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan
304	Dinas Pemuda dan Olahraga
305	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jakpus
306	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jakut
307	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jakbar
308	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jaktim
309	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jaksel
310	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
311	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
312	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat
313	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur
314	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
315	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
316	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
317	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - Jakpus
318	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - Jakut
319	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - Jakbar
320	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - Jaktim
321	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - Jaksel
322	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten - Kep. Seribu
323	Unit Pengelola Kawasan Kotatua
324	Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya
325	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
326	Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata
327	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
328	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
329	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta
330	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta
331	Unit Pengelola Museum Seni
332	Pusat Konservasi Cagar Budaya
333	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata
334	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
335	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota - Jakpus
336	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota - Jakut
337	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota - Jakbar
338	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota - Jaksel
339	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota - Jaktim
340	Dinas Kehutanan
341	Suku Dinas Kehutanan Kota - Jakpus
342	Suku Dinas Kehutanan Kota - Jakut

No.	SKPD/UKPD
343	Suku Dinas Kehutanan Kota - Jakbar
344	Suku Dinas Kehutanan Kota - Jaksel
345	Suku Dinas Kehutanan Kota - Jaktim
346	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
347	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan
348	Unit Pengadaan Tanah Kehutanan
349	Dinas Perindustrian dan Energi
350	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - Jakpus
351	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - Jakut
352	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - Jakbar
353	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - Jaksel
354	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - Jaktim
355	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten - Kep. Seribu
356	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil
357	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik
358	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
359	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota - Jakpus
360	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota - Jakut
361	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota - Jakbar
362	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota - Jaksel
363	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota - Jaktim
364	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten - Kep. Seribu
365	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
366	Badan Pengelola Keuangan Daerah
367	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - Jakpus
368	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - Jakut
369	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - Jakbar
370	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - Jaksel
371	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - Jaktim
372	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
373	Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
374	Badan Pengelola Aset Daerah
375	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota - Jakpus
376	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota - Jakut
377	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota - Jakbar
378	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota - Jaksel
379	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota - Jaktim
380	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten - Kep. Seribu
381	Pusat Penyimpanan Barang Daerah
382	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
383	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota - Jakbar
384	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota - Jakpus
385	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota - Jaksel
386	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota - Jaktim
387	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota - Jakut
388	Badan Kepegawaian Daerah
389	Suku Badan Kepegawaian Kota - Jakpus
390	Suku Badan Kepegawaian Kota - Jakut
391	Suku Badan Kepegawaian Kota - Jakbar
392	Suku Badan Kepegawaian Kota - Jaksel
393	Suku Badan Kepegawaian Kota - Jaktim

No.	SKPD/UKPD
394	Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
395	Pusat Data dan Informasi Kepegawaian
396	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta
397	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
398	Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai
399	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota - Jakpus
401	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota - Jakut
402	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota - Jakbar
403	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota - Jaksel
404	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota - Jaktim
405	Sekretariat Daerah
406	Biro Administrasi Sekretariat Daerah
407	Biro Tata Pemerintahan
408	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
409	Biro Hukum
410	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
411	Biro Umum
412	Biro Perekonomian
413	Biro Kesejahteraan Sosial
414	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
415	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
416	DPRD Provinsi
417	Sekretariat DPRD
418	Inspektorat
419	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jakpus
420	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jakut
421	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jakbar
422	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jaksel
423	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jaktim
424	Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten - Kep. Seribu
425	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
426	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota dan Kota Jakarta Pusat
427	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
428	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Jakarta Selatan
429	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Jakarta Timur
430	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Jakarta Barat
431	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
432	Kota Administrasi Jakarta Pusat
433	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus
434	Kelurahan Gelora - Jakpus
435	Kelurahan Bendungan Hilir - Jakpus
436	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus
437	Kelurahan Petamburan - Jakpus
438	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus
439	Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus
440	Kelurahan Kampung Bali - Jakpus
441	Kecamatan Menteng - Jakpus
442	Kelurahan Menteng - Jakpus
443	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus
444	Kelurahan Cikini - Jakpus
445	Kelurahan Gondangdia - Jakpus



No.	SKPD/UKPD
446	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus
447	Kecamatan Senen - Jakpus
448	Kelurahan Kenari - Jakpus
449	Kelurahan Paseban - Jakpus
450	Kelurahan Kramat - Jakpus
451	Kelurahan Kwitang - Jakpus
452	Kelurahan Senen - Jakpus
453	Kelurahan Bungur - Jakpus
454	Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus
455	Kelurahan Rawasari - Jakpus
456	Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakpus
457	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus
458	Kecamatan Johar Baru - Jakpus
459	Kelurahan Johar Baru - Jakpus
460	Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus
461	Kelurahan Galur - Jakpus
462	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus
463	Kecamatan Kemayoran - Jakpus
464	Kelurahan Harapan Mulia - Jakpus
465	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus
466	Kelurahan Sumur Batu - Jakpus
467	Kelurahan Serdang - Jakpus
468	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus
469	Kelurahan Kemayoran - Jakpus
470	Kelurahan Utan Panjang - Jakpus
471	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakpus
472	Kecamatan Sawah Besar - Jakpus
473	Kelurahan Pasar Baru - Jakpus
474	Kelurahan Karang Anyar - Jakpus
475	Kelurahan Kartini - Jakpus
476	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus
477	Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jakpus
478	Kecamatan Gambir - Jakpus
479	Kelurahan Cideng - Jakpus
480	Kelurahan Petojo Selatan - Jakpus
481	Kelurahan Gambir - Jakpus
482	Kelurahan Kebon Kelapa - Jakpus
483	Kelurahan Petojo Utara - Jakpus
484	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus
485	Kota Administrasi Jakarta Utara
486	Kecamatan Penjaringan - Jakut
487	Kelurahan Kamal Muara - Jakut
488	Kelurahan Kapuk Muara - Jakut
489	Kelurahan Pejagalan - Jakut
490	Kelurahan Penjaringan - Jakut
491	Kelurahan Pluit - Jakut
492	Kecamatan Pademangan - Jakut
493	Kelurahan Ancol - Jakut
494	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut
495	Kelurahan Pademangan Timur - Jakut

No.	SKPD/UKPD
496	Kecamatan Tanjung Priok - Jakut
497	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut
498	Kelurahan Sunter Agung - Jakut
499	Kelurahan Papanggo - Jakut
500	Kelurahan Warakas - Jakut
501	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut
502	Kelurahan Kebon Bawang - Jakut
503	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut
504	Kecamatan Koja - Jakut
505	Kelurahan Tugu Utara - Jakut
506	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut
507	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut
508	Kelurahan Koja - Jakut
509	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut
510	Kelurahan Lagoa - Jakut
511	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
512	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut
513	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut
514	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut
515	Kecamatan Cilincing - Jakut
516	Kelurahan Sukapura - Jakut
517	Kelurahan Rorotan - Jakut
518	Kelurahan Marunda - Jakut
519	Kelurahan Cilincing - Jakut
520	Kelurahan Semper Timur - Jakut
521	Kelurahan Semper Barat - Jakut
522	Kelurahan Kalibaru - Jakut
523	Kota Administrasi Jakarta Barat
524	Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
525	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar
526	Kelurahan Sukabumi Utara - Jakbar
527	Kelurahan Kelapa Dua - Jakbar
528	Kelurahan Duri Kepa - Jakbar
529	Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar
530	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar
531	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar
532	Kecamatan Kembangan - Jakbar
533	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar
534	Kelurahan Meruya Utara - Jakbar
535	Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar
536	Kelurahan Srengseng - Jakbar
537	Kelurahan Joglo - Jakbar
538	Kelurahan Kembangan Utara - Jakbar
539	Kecamatan Cengkareng - Jakbar
540	Kelurahan Cengkareng Barat - Jakbar
541	Kelurahan Cengkareng Timur - Jakbar
542	Kelurahan Kapuk - Jakbar
543	Kelurahan Duri Kosambi - Jakbar
544	Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar
545	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar
546	Kecamatan Kalideres - Jakbar

No.	SKPD/UKPD
547	Kelurahan Kamal - Jakbar
548	Kelurahan Tegal Alur - Jakbar
549	Kelurahan Pegadungan - Jakbar
550	Kelurahan Kalideres - Jakbar
551	Kelurahan Semanan - Jakbar
552	Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar
553	Kelurahan Tomang - Jakbar
554	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar
555	Kelurahan Grogol - Jakbar
556	Kelurahan Jelambar - Jakbar
557	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar
558	Kelurahan Wijaya Kusuma - Jakbar
559	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar
560	Kecamatan Palmerah - Jakbar
561	Kelurahan Palmerah - Jakbar
562	Kelurahan Kemanggisan - Jakbar
563	Kelurahan Slipi - Jakbar
564	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar
565	Kelurahan Jati Pulo - Jakbar
566	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakbar
567	Kecamatan Tambora - Jakbar
568	Kelurahan Kalianyar - Jakbar
569	Kelurahan Duri Utara - Jakbar
570	Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar
571	Kelurahan Krendang - Jakbar
572	Kelurahan Jembatan Besi - Jakbar
573	Kelurahan Angke - Jakbar
574	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar
575	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar
576	Kelurahan Tambora - Jakbar
577	Kelurahan Pekojan - Jakbar
578	Kelurahan Roa Malaka - Jakbar
579	Kecamatan Taman Sari - Jakbar
580	Kelurahan Krukut - Jakbar
581	Kelurahan Maphar - Jakbar
582	Kelurahan Taman Sari - Jakbar
583	Kelurahan Tangki - Jakbar
584	Kelurahan Mangga Besar - Jakbar
585	Kelurahan Keagungan - Jakbar
586	Kelurahan Glodok - Jakbar
587	Kelurahan Pinangsia - Jakbar
588	Kota Administrasi Jakarta Selatan
589	Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel
590	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel
591	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel
592	Kelurahan Pondok Pinang - Jaksel
593	Kelurahan Cipulir - Jaksel
594	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel
595	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel
596	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel
597	Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel
598	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel


No.	SKPD/UKPD
599	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel
600	Kelurahan Ulujami - Jaksel
601	Kelurahan Bintaro - Jaksel
602	Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel
603	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel
604	Kelurahan Jati Padang - Jaksel
605	Kelurahan Ragunan - Jaksel
606	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel
607	Kelurahan Kebagusan - Jaksel
608	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel
609	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel
610	Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
611	Kelurahan Jagakarsa - Jaksel
612	Kelurahan Ciganjur - Jaksel
613	Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel
614	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel
615	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel
616	Kelurahan Cipadak - Jaksel
617	Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel
618	Kelurahan Tegol Parang - Jaksel
619	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel
620	Kelurahan Pela Mampang - Jaksel
621	Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel
622	Kelurahan Bangka - Jaksel
623	Kecamatan Pancoran - Jaksel
624	Kelurahan Pancoran - Jaksel
625	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel
626	Kelurahan Kalibata - Jaksel
627	Kelurahan Rawa Jati - Jaksel
628	Kelurahan Pangadegan - Jaksel
629	Kelurahan Cikoko - Jaksel
630	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel
631	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel
632	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel
633	Kelurahan Pulo - Jaksel
634	Kelurahan Petogogan - Jaksel
635	Kelurahan Melawai - Jaksel
636	Kelurahan Kramat Pela - Jaksel
637	Kelurahan Gunung - Jaksel
638	Kelurahan Selong - Jaksel
639	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel
640	Kelurahan Senayan - Jaksel
641	Kecamatan Setiabudi - Jaksel
642	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel
643	Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel
644	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel
645	Kelurahan Karet - Jaksel
646	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel
647	Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel
648	Kelurahan Guntur - Jaksel
649	Kelurahan Setiabudi - Jaksel
650	Kecamatan Tebet - Jaksel

No.	SKPD/UKPD
651	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel
652	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel
653	Kelurahan Tebet Timur - Jaksel
654	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel
655	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel
656	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel
657	Kelurahan Manggarai - Jaksel
658	Kecamatan Cilandak - Jaksel
659	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel
660	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel
661	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel
662	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel
663	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel
664	Kota Administrasi Jakarta Timur
665	Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim
666	Kelurahan Pekayon - Jaktim
667	Kelurahan Kalisari - Jaktim
668	Kelurahan Kampung Baru - Jaktim
669	Kelurahan Cijantung - Jaktim
670	Kelurahan Gedong - Jaktim
671	Kecamatan Ciracas - Jaktim
672	Kelurahan Cibubur - Jaktim
673	Kelurahan Kampung Rambutan - Jaktim
674	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim
675	Kelurahan Susukan - Jaktim
676	Kelurahan Ciracas - Jaktim
677	Kecamatan Cipayung - Jaktim
678	Kelurahan Cipayung - Jaktim
679	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim
680	Kelurahan Ceger - Jaktim
681	Kelurahan Bambu Apus - Jaktim
682	Kelurahan Setu - Jaktim
683	Kelurahan Cilangkap - Jaktim
684	Kelurahan Munjul - Jaktim
685	Kelurahan Pondok Rangon - Jaktim
686	Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
687	Kelurahan Kampung Tengah - Jaktim
688	Kelurahan Kampung Dukuh - Jaktim
689	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim
690	Kelurahan Batu Ampar - Jaktim
691	Kelurahan Bale Kambang - Jaktim
692	Kelurahan Cililitan - Jaktim
693	Kelurahan Cawang - Jaktim
694	Kecamatan Makasar - Jaktim
695	Kelurahan Cipinang Melayu - Jaktim
696	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim
697	Kelurahan Kebon Pala - Jaktim
698	Kelurahan Makasar - Jaktim
699	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim
700	Kecamatan Jatinegara - Jaktim
701	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim
702	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim

No.	SKPD/UKPD
703	Kelurahan Bali Mester - Jaktim
704	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim
705	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim
706	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim
707	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim
708	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim
709	Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
710	Kelurahan Klender - Jaktim
711	Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim
712	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim
713	Kelurahan Malaka Sari - Jaktim
714	Kelurahan Malaka Jaya - Jaktim
715	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim
716	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim
717	Kecamatan Matraman - Jaktim
718	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim
719	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim
720	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim
721	Kelurahan Kayu Manis - Jaktim
722	Kelurahan Pal Meriam - Jaktim
723	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim
724	Kecamatan Pulogadung - Jaktim
725	Kelurahan Pisangan Timur - Jaktim
726	Kelurahan Cipinang - Jaktim
727	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim
728	Kelurahan Pulogadung - Jaktim
729	Kelurahan Rawamangun - Jaktim
730	Kelurahan Jati - Jaktim
731	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim
732	Kecamatan Cakung - Jaktim
733	Kelurahan Jatinegara - Jaktim
734	Kelurahan Rawa Terate - Jaktim
735	Kelurahan Penggilingan - Jaktim
736	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim
737	Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim
738	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim
739	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim
740	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu
741	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu
742	Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu
743	Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu
744	Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu
745	Kecamatan Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu
746	Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu
747	Kelurahan P. Tidung - Kep. Seribu
748	Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu
749	PD Air Minum Jaya
750	PD Dharma Jaya
751	PD PAL Jaya
752	PD Pasar Jaya
753	PD Pembangunan Sarana Jaya
754	PT Alakasa Industrindo, Tbk

No.	SKPD/UKPD
755	PT Asuransi Bangunan Askrida
756	PT Bank DKI
757	PT Cemani Toka
758	PT Delta Jakarta, Tbk
759	PT Determinan Indah
760	PT Food Station Tjipinang Jaya
761	PT Graha Sahari Suryajaya
762	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
763	PT Jakarta International Expo
764	PT Jakarta Propertindo
765	PT Jakarta Tourisindo
766	PT Jamkrida Jakarta
767	PT Jaya Nur Sukses
768	PT Kawasan Berikat Nasional (KBN)
769	PT Mass Rapid Transit Jakarta
770	PT Pakuan Internasional
771	PT Pembangunan Jaya
772	PT Pembangunan Jaya Ancol, TBK
773	PT Ratax Armada
774	PT Transportasi Jakarta
775	BP Taman Hiburan Rakyat Lokasari

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

 *Imi Baswedan*

IMANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta.

Nomor : 540 TAHUN 2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>A PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>																												
1	Satuan Polisi Pamong Praja		I															1. Menilai efektivitas pelaksanaan pertertiban Reklame. 2. Menilai efektivitas pengelolaan aset Satpol PP. 3. Menilai efektivitas dan keekonomisan pengadaan barang dan jasa.	1. Penertiban Papan Reklame Tahun 2017; 2. Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2017; 3. Pengadaan barang dan jasa selain KDO tahun 2017.	1. Penertiban papan reklame; 2. Pencatatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan KDO; 3. Pengadaan barang dan jasa selain KDO.	15 (3 tim)	15						
2	Biro Urmum																	1. Menilai efektivitas pengelolaan PULP. 2. Menilai keekonomisan dan efektivitas Pengadaan Barang/ Jasa. 3. Menilai 3E pengelolaan sarana prasarana / fasilitas Komplek Balai Kota.	1. Pengelolaan PULP Tahun 2017; 2. Pengadaan Barang Tahun 2017; 3. Pemeliharaan sarana prasarana / fasilitas Komplek Balaikota Tahun 2017.	1. Pengadaan, Pengelolaan dan Pembayaran Gaji/Penghasilan PULP (ME, Pamdal, Kebersihan); 2. Pengadaan Barang; 3. Pemeliharaan sarana prasarana / fasilitas Komplek Balaikota (gedung, AC, lift, ME, Rumah Dinas).	15	20						
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																	Menilai efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan Diklat.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat ("Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Diklat) T.A 2018 (yang telah dilaksanakan dan dalam proses pelaksanaan)	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; 2. Pendayagunaan Hasil Pendidikan dan Pelatihan; 3. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.	15	20						
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik																	1. Menilai efektivitas pemanfaatan Tenaga Ahli. 2. Menilai efektivitas pengelolaan prasarana dan sarana kerja di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik; 3. Menilai efektivitas Jakarta Smart City	1. Pengelolaan Tenaga Ahli Tahun 2017; 2. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di Dinas komunikasi, informatika dan Statistik Tahun 2017; 3. Kinerja Jakarta Smart City	1. Pengelolaan Tenaga Ahli yang meliputi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pembayaran Gaji/Penghasilan Tenaga Ahli; 2. Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja di Dinas komunikasi, informatika dan Statistik; 3. Kinerja Jakarta Smart City	15	20						



NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																1. Menilai efektivitas pengelolaan eKTP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2. Menilai efektivitas pemanfaatan Sidukun 3 in 1 (Sistem Informasi Dokumen Kepundudukan, 3 Jenis Layanan/Pelaksana dalam satu proses), program integrasi antara 3 instansi di 1 tempat. Antara lain Disdukcapil, BPJS, dan rumah sakit; 3. Menilai keekonomisan dan efektivitas Pengadaan Barang/ Jasa.	1. Penyelenggaraan eKTP Tahun 2017; 2. Penyelenggaraan Sidukun pada Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Daerah dan Swasta Tahun 2017; 3. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.	1. Perakaman, pencetakan dan pendistribusian eKTP; 2. Proses Pelaksanaan dan pengembangan Sidukun 3 in 1 serta terintegrasinya Layanan (NIK, Akta Kelahiran, KIA, KK, BPJS) di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Daerah dan Swasta; 3. Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	15	20
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan																1. Menilai keekonomisan dan efektivitas Pengelolaan Aset. 2. Menilai keekonomisan dan efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pada Bidang Prasarana dan Sarana; 3. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional; 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat.	1. Pengadaan Barang dan Jasa T.A 2018; 2. Pengelolaan Aset Tahun 2017; 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat Tahun 2017.	1. Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pada Bidang Prasarana dan Sarana; 2. Pencatatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional; 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat.	15	20
7	PD Pembangunan Sarana Jaya																1. Kelengkapan dokumen administrasi properti; 2. Pemasaran properti yang siap jual.	Pengamanan dan Pemanfaatan Properti Tahun 2017	1. Kelengkapan dokumen administrasi properti; 2. Pemasaran properti yang siap jual.	10	20
8	PD AM Jaya																Kegiatan pengawasan distribusi dan pelayanan air minum Wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu Tahun 2017	Pengawasan distribusi dan pelayanan air minum	Pengawasan distribusi dan pelayanan air minum	10	20
9	UP Parkir Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta																1. Menilai efektivitas pengelolaan parkir (termasuk park and ride) 2. Menilai efektivitas pengawasan dan pelayanan air minum.	1. Pelayanan Perparkiran Tahun 2018 (termasuk park and ride); 2. Penerimaan Pendapatan Parkir Tahun 2017	1. Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan (on street); 2. Pengelolaan parkir, sistem, terminal parkir elektronik yang dikelola pihak ketiga; 3. Pengelolaan parkir off street oleh UP Parkir; 4. Park and Ride.	10	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
10	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah							II								1. Pelaksanaan tugas dan fungsi; 2. Pasar Terpadu Kabupaten Kepulauan Seribu	10	20
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												II			Pelayanan perizinan dan non perizinan rumpun ketataruangan, kajian lingkungan, pembangunan dan lelangan bangunan, serta Mall Pelayanan Publik dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Online	10	20
12	Badan Pengelola Aset Daerah												III			Tata Kelola Sistem Informasi Aset dan Pemanfaatan Aset yang di kerjasamakan dengan pihak ke III	13	20
13	Badan Pajak dan Retribusi Daerah											III				1. Data Titik sumur yang tercatat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait; 2. Penerimaan Pajak Air Tanah.	13	20
14	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa												III			Proses lelang	13	20
15	Dinas Sumber Daya Air														IV	Fungsi pompa air sebagai pengendali banjir	12	20
16	Dinas Bina Marga														IV	Jalan dan kelengkapan jalan	12	20
17	Dinas Lingkungan Hidup														IV	Pembangunan ITF, Pengurangan Sampah di Sumber, Optimalisasi Bantar Gebang	12	20
18	Unit Pengelola Rumah Susun															Penghunian dan pemanfaatan Rumah Susun	12	20
19	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang															Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pemda sesuai Peraturan	12	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
20	Dinas Sosial				V											Menilai efektivitas pengelolaan penyediaan makanan.	Penyediaan makanan bagi WBS pada Pantu Sosial Rumpun Anak, Rumpun Disabilitas, dan Rumpun Psikotik Tahun 2017	- Pencapaian standar gizi bagi WBS; - Kualitas mutu, volume dan spesifikasi dari masing-masing item bahan permakanan; - Kualitas gizi hasil pengadaan permakanan	12	15
21	Dinas Kesehatan			V												Menilai efektivitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian Fasilitas Kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC)	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Kesehatan serta Universal Health Coverage (UHC) pada 5 Wilayah Kota pada Tahun 2017	Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Fasilitas Kesehatan serta Universal Health Coverage (UHC)	16	20
22	Rumah Sakit Umum Kecamatan					V										Menilai efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat.	Pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Kecamatan	Pelayanan Kesehatan	16	20
23	Dinas Pendidikan									V						Menilai efektivitas BLUD SMK dan Dual System Seluruh SMK	BLUD SMK dan Dual System Seluruh SMK	- BLUD SMK - Dual System Seluruh SMK	12	15
24	Rumah Sakit Umum Daerah										V					Menilai efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat.	Pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD Kelas A Tarakan, RSUD Kelas B Pasar Rebo, dan RSUD Kelas D Mampang Prapatan Tahun 2017	- Pelayanan Kesehatan; - Pengelolaan Keuangan BLUD	16	20
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan												V			Menilai efektivitas dan keekonomisan Pengadaan Barang dan Jasa.	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017	- Pengadaan Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan Buku dan Kearsipan; - Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan.	16	20
26	Dinas Pendidikan															Menilai efektivitas pengelolaan KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Tata Kelola Guru	Pengelolaan KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Tata Kelola Guru	- Hasil verifikasi penerimaan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus); - Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Biro Pendidikan Mental Spiritual dan Biro Kesejahteraan Sosial; - Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul; - Tata Kelola Guru	8	15

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>																												
1	Pemantauan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	I, II, III, IV, V																	Mengenal barang dan jasa Perangkat Daerah/Unit Kerja/UKPD	Mengevaluasi apakah RUP yang disusun oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja telah sesuai dengan ketentuan (diengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai seperti KAK, RAB, TOR, HPS, Spesifikasi Teknis dsb)	14	10						
2	Pemantauan LHKASN	I				I													Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tingkat kepatuhan pengisian LHKASN masih dibawah 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi Data pengisian LHKASN yang dilakukan oleh wajib lapor LHKASN;</li> <li>- Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN terkait permasalahan dalam pengisian di Lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja.</li> </ul>	15	20						
3	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah/Unit Kerja				I, II, III, IV, V													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	Renstra, RPJMD, Perkin dan LAKIP Perangkat Daerah/Unit Kerja	15	20							
4	Tutup Buku Perusahaan Daerah	II																Penyesuaian kas fisik dengan buku besar/buku besar bendahara	1. PD Pasar Jaya 2. PD Dharma Jaya 3. PD PAL 4. PD AM Jaya 5. PD Sarana Jaya	10	20							
5	Monitoring pencapaian ketersediaan kecukupan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian																	1. Kontribusi pangan dari BUMD terkait; 2. Program terkait dengan Kontribusi pangan	1. Kebijakan dan program dalam rangka pencapaian ketersediaan kecukupan pangan; 2. PKS dengan daerah lain pemasok pangan untuk DKI Jakarta; 3. Subsidi pangan; 4. Tempat penyimpanan pangan; 5. Kerja sama penyediaan pangan; 6. Pasar rakyat dan pasar terpadu	10	20							

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
6	Monitoring Pelaksanaan OK OCE (Dinas KUMKMP, DPE, Disnakertrans, Dinsos, Disdik, DPPAPP)				II		II			II					Untuk menilai efektivitas program OK OCE secara terpadu	Pelaksanaan OK OCE (Dinas KUMKMP, DPE, Disnakertrans, Dinsos, Disdik, DPPAPP)	1. Dinas KUMKMP; 2. Dinas Perindustrian dan Energi; 3. Disnakertrans; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Pendidikan; 6. DPPAPP	5	10
7	Monitoring Penataan Kawasan Tanah Abang					II						II			Untuk menilai efektivitas penataan Kawasan Tanah Abang (penataan wilayah, fasilitas dan penataan lalu lintas)	Penataan Kawasan Tanah Abang (penataan wilayah, fasilitas dan pedagang, dan penataan lalu lintas)	1. PD Pasar Jaya; 2. PD Sarana Jaya; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas KUMKMP; 5. Walikota Jakarta Pusat	15	20
8	Monitoring OK OTRIP, Sekolah Pengemudi, dan ERP						II								Untuk menilai efektivitas program OK OTRIP, Sekolah Pengemudi, ERP	1. Program OK OTRIP; 2. Sekolah Pengemudi; 3. ERP	1. Dinas Perhubungan; 2. PT Transjakarta; 3. BPSDM; 4. Disnakertrans; 5. BPPEJ	15	20
9	Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017		III												Meyakini LKPD Per 31 Desember 2017 telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, LK Peringkat Daerah/Unit Kerja Tahun 2017	Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD, Laporan Keuangan mencakup LRA, Neraca, LO, LPE, LAK dan CaLK dan CaLK dan CaLK	60	40
10	Revisi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa		III							III					Untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Data Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	13	10
11	Monitoring Pelayanan Pembayaran Pajak														Mengetahui efektivitas pelaksanaan Pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB	UPPKB pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Ketepatan waktu pelayanan	13	10
12	Revisi LKPD Semester I Tahun 2018											III			Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Penilaian terbatas terhadap keandalan SPIP dan Kesesuaian dengan SAP	mencakup LRA dan Laporan SAL	50	40
13	Revisi RKA dan RKBMD												III		Memberikan keyakinan terbatas atas megenai akurasi keandalan dan keabsahan Dokumen Anggaran	KUA, PPAS RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja, RKBMD	Konsistensi Dokumen Anggaran	13	15

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
14	Tutup Buku Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Tahun 2018														III	Mengetahui realisasi penyerapan anggaran akhir tahun 2018	E-BKU dan Rekening Bank	Perangkat Daerah/Unit Kerja	13	20
15	Pemantauan Pelaksanaan Program DP 0%				IV											Menilai pelaksanaan program DP 0%	Pelaksanaan program DP 0%	Perencanaan dan Pelaksanaan Program DP 0%	12	20
16	Pemantauan Bantuan Sosial Kartu Jakarta Lansia pada Dinas Sosial															Menilai kebutuhan dasar bagi lansia dalam rangka pemberian pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme pendataan;</li> <li>- Verifikasi persyaratan oleh Kelurahan;</li> <li>- Anggaran Bantuan Sosial;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meyakini kebenaran hasil pendataan usia lansia yang telah mencapai 60 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta;</li> <li>- Meyakini kebenaran hasil verifikasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial sebagai calon penerima bantuan sosial dengan jumlah rekening penerima bantuan yang ditransfer oleh PT. Bank DKI;</li> <li>- Mengevaluasi hasil monitoring yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Sosial terhadap penggunaan bantuan sosial untuk PKD (KJL).</li> </ul>	16	15
17	Reviu KPBU atas Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional dan Pemantauan Kegiatan Asian Games															Meyakini kegiatan perencanaan pembangunan Stadion Bertaraf Internasional dengan skema KPBU dan dukungan pelaksanaan Asian Games tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional dengan Skema KPBU;</li> <li>- Perekrutan tenaga honorer untuk petugas lapangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan dukungan Asian Games 2018.</li> </ul>	8	15	
18	Pemantauan atas kegiatan pemberian makanan tambahan untuk siswa sekolah tahun 2018															Menilai pelaksanaan pemberian makanan tambahan untuk siswa sekolah	Pelaksanaan pemberian makanan tambahan untuk siswa sekolah	Kegiatan pemberian makanan untuk siswa sekolah	8	10
19	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi KORSUPGAH Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta															Menilai pelaksanaan rencana aksi KORSUPGAH	Rencana aksi KORSUPGAH Tahun 2018	OPD/UPD yang telah ditetapkan untuk melaksanakan KORSUPGAH	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

I,II,III,IV,V,VI

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
20	Probiti Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH														I, II, III, IV, V, VI	Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Dinas Pendidikan (Irbn V/Konstruksi); Dinas Kesehatan (Irbn II/Konstruksi); Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Irbn IV/Pembangunan Rusun); Dinas Kehutanan (Irbn investigasi/Pengadaan Lahan); Dinas Bina Marga (Irbn III/Pengadaan Lahan); Dinas Sumber Daya Air (Irbn I/Pengadaan Tanah);	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
21	Pelaksanaan Peer Reviu pada Inspektorat Pembantu Wilayah														I, II, IV, V	Menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan	Kegiatan Pengawasan Tahun 2017	Inspektorat Pembantu Wilayah Irbn I : Jakarta Utara (Sudin Pendidikan I dan II) Irbn II : Jakarta Selatan (Sudin Lingkungan Hidup dan PTSP) Irbn III : Jakarta Barat (Sudin SDA) Irbn IV : Jakarta Pusat (Sudin Lingkungan Hidup) Irbn V : Jakarta Timur (Sudin Lingkungan Hidup) Irbn Investigasi : Kepulauan Seribu (Sudin SDA)	5 (per irban)	15
22	Pengawasan atas Current Issue dan Perintah Pimpinan														I, II, III, IV, V, VI	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
23	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan														I, II, III, IV, V	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
24	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus														I, II, III, IV, V, VI	Sesuai Pengaduan/Kasus	Sesuai Pengaduan/Kasus	Sesuai Pengaduan/Kasus	Sesuai Kebutuhan	
25	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Eksternal														I, II, III, IV, V, VI, VII	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Eksternal dan Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Eksternal	10	20	

NO	URAIAN/PRANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>C PENGAWASAN LAINNYA</b>																												
1	Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta															Forum APiP	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyusunan dan pengembangan kerangka manajemen risiko (Forum APiP)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan								
2	Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan ( <i>Three Lines of Defense</i> ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta															Forum APiP	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyusunan dan pengembangan kerangka manajemen risiko model Tiga Lini Pertahanan ( <i>Three Lines of Defense</i> )	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan								
3	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan															I,II,III,IV,V,VI	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat Provinsi	Perangkat daerah/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Forum APiP membuat SOP Pelayanan Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan								
4	Pengendalian Gratifikasi															I,II,III,IV,V,VI	Program pengendalian gratifikasi tahun 2018	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan								
5	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar															I,II,III,IV,V,VI	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Provinsi	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan								
6	Surveillance Pelayanan Publik															I,II,III,IV,V,VI	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Provinsi	Urban I (Pelayanan Disdukcapil Sidukun dan Integrasi Kependudukan) Urban II (Pelayanan PTSP) Urban III (Pelayanan PKB-BBNKB) Urban IV (Pelayanan Rusun/UPRS) Urban V (Pelayanan KJP Plus/Permakanan WBS dan Pelayanan Kesehatan RSUD) Urban Bidang Investigasi (Pelayanan Reklame dan PBB)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan								





Lampiran III.1 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

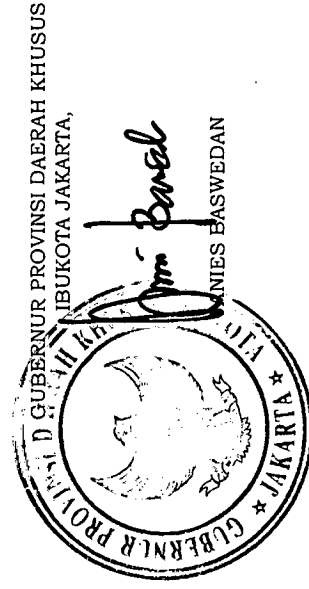
Nomor : 540 TAHUN 2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
<b>A</b>														<b>PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>					
1	Suku Dinas Kehutanan														1. Menilai dan mengevaluasi efektivitas Pengelolaan P.JLP; 2. Menilai apakah pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa efektif, ekonomis dan efisien.	1. Pengelolaan P.JLP; 2. Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2017.	1. Pembayaran Gaji/Penghasilan P.JLP (Taman, TPU, Jalur); 2. Pengadaan Barang/Jasa.	6	20
2	3 Kecamatan dan Kelurahan														1. Menilai dan mengevaluasi efektivitas Pengelolaan PPSU; 2. Menilai apakah pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa efektif, ekonomis dan efisien.	1. Pengelolaan PPSU; 2. Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2017.	1. Pembayaran Gaji/Penghasilan PPSU; 2. Pengadaan Barang/Jasa.	16	20
3	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I														Menilai efektivitas pengelolaan Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP pada SMP Negeri Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I tahun 2018	Pertanggungjawaban Dana BOP	6	20
4	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II														Menilai efektivitas pengelolaan Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP pada SMP Negeri Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I tahun 2018	Pertanggungjawaban Dana BOP	6	20
5	Suku Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi														Pengawasan pemeriksaan pajak restoran dan pajak reklame	Data Pajak Restoran dan Reklame	Data Pemeriksaan Pajak Restoran dan Reklame yang tercatat di Suban Pajak dan Retribusi Daerah;	6	20
6	Suku Dinas KUMKMP														Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan UKM	Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKM Tahun Anggaran 2018 (S.d Sep 2018)	1. Pembinaan UKM; 2. Penataan UKM; 3. Pengembangan UKM; 4. Perlindungan UKM; 5. Pembentukan Wirausaha Baru (OK OCE)	11	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
7	Suku Dinas Perindustrian dan Energi														Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Industri Tahun Anggaran 2018 (s.d Agustus 2018)	1. Penataan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri; 2. Pengembangan kerjasama dan hubungan kemitraan antar industri dengan sektor ekonomi dan non ekonomi.	6	20		
<b>B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)</b>																					
1	Pemantauan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)																Menilai kepatuhan SKPD/UKPD dalam penyusunan RUP dan mendorong SKPD/UKPD untuk segera mempublikasi RUP dalam SIRUP, melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta mendorong SKPD/UKPD mempublisk RUP ke dalam SIRUP	Pengadaan barang dan jasa SKPD/UKPD	Mengevaluasi apakah RUP yang disusun oleh SKPD/UKPD telah sesuai dengan ketentuan (diikuti dengan dokumen pendukung yang memadai seperti KAK, RAB, TOR, HPS, Spesifikasi Teknis dsb), Mengevaluasi identifikasi kebutuhan, pemetaan pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, penempatan spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa serta organisasi pengadaan	12	10
2	Reviu Penerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa																Untuk mengetahui realisasi penerapan anggaran belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	UKPD dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Data Realisasi Penerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	12	10
3	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)																Menilai batasan tanggungjawab antara pejabat lama dan pejabat baru	UKPD dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Pengelolaan barang; 3. Pengelolaan keuangan	11	20
4	Pengawasan atas Current Issue dan Perintah Pimpinan																Menyelesaikan permasalahan tertentu	UKPD dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	UKPD dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	20	20
5	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus																Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan	1. Pengadaan barang dan jasa; 2. Sengketa tanah; 3. Pengelolaan keuangan; 4. Pengelolaan barang milik daerah; 5. Pengelolaan kepegawaian	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	11	20
6	Probit Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH																Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7	Pengawasan dalam rangka penutupan kas dan persediaan akhir Tahun Anggaran 2018																Meyakini saldo kas dan persediaan dan akhir tahun anggaran 2018	Saldo Kas, Barang Persediaan	Nilai Saldo Kas dan Kelengkapannya, Nilai Barang Persediaan	12	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
8	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP														Meningkatkan percepatan proses tindak lanjut hasil pengawasan dan APIP	Temuan dan rekomendasi/satan hasil pemeriksaan tahun 2018 dan sebelumnya	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKcu, PPBJ, PPHP dan ASN lainnya	12	20	
9	Monitoring fungsi rumah pompa di lingkungan Kota Adm. Jakarta Barat														Mengetahui sejauh mana keberadaan dan fungsi rumah pompa di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat	1. Kondisi Rumah pompa; 2. Fungsi rumah pompa	1. Status pengelola LPS; 2. Daya tampung volume LPS	12	10	
10	Pemantauan penyusunan RKEU dan RKPBU														Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Percanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengetahui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	20	20	
<b>C</b>	<b>PENGAWASAN LAINNYA</b>																			
1	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan														Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 tingkat Wilayah	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
2	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
3	Surveillance Pelayanan Publik														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Pelayanan Maktam, PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
4	Pengelolaan UPG														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi	Tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	



Nomor : 540 TAHUN 2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

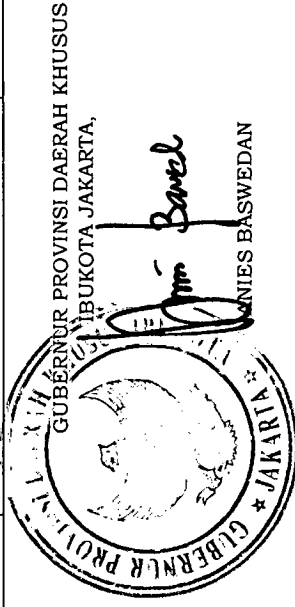
**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		TUJUAN																	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
<b>A. PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>																			
1	Suku Dinas Kehutanan dan Satpel Kecamatan														1. Menilai dan mengevaluasi efektivitas Pengelolaan PJLP; 2. Menilai apakah pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa efektif, ekonomis dan efisien.	1. Pengelolaan PJLP; 2. Pengadaan Barang/Jasa tahun 2017.	1. Pembayaran Gaji/Penghasilan dan kinerja PJLP (Taman, TPU, Jalur); 2. Pengadaan Barang/Jasa.	19	20
2	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan														Meyakini pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan sesuai ketentuan	Pendirian bangunan di wilayah Jakarta Pusat	Bangunan yang melanggar IMB	9	20
3	Kelurahan di lingkungan Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Sawah Besar														1. Menilai dan mengevaluasi efektivitas Pengelolaan PPSU; 2. Menilai apakah pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa efektif, ekonomis dan efisien.	1. Pengelolaan PPSU; 2. Pengadaan Barang/Jasa tahun 2017.	1. Pembayaran Gaji/Penghasilan PPSU; 2. Pengadaan Barang/Jasa.	19	20
4	Suku Dinas Perhubungan														Menilai efektivitas pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional	1. Pemeliharaan dan perawatan KDO tahun 2017 2. Penggunaan BBM KDO tahun 2017	1. Pemeliharaan dan perawatan KDO roda dua dan empat; 2. Penggunaan BBM KDO roda dua dan empat.	19	20
5	Suku Dinas Perindustrian dan Energi														Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Industri Tahun Anggaran 2018 (S.d Agustus 2018)	1. Penataan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri; 2. Pengembangan kerjasama dan hubungan kemitraan antar industri dengan sektor ekonomi dan non ekonomi.	19	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
6	Suku Dinas KUMKMP														Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan UKM	1. Pengelolaan penataan lokasi sementara dan lokasi binaan, Program OK OCE; 2. Pengadaan barang/jasa Tahun 2018.	1. Lokasi binaan dan lokasi sementara, program OK OCE; 2. Pengadaan barang/jasa.	19	20
7	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														1. Menilai efektivitas Community Action Plan (CAP) dan Perbaikan 2. Menilai efektivitas pengadaan barang/jasa;	1. CAP dan Perbaikan 2. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa tahun 2018.	1. CAP dan Perbaikan 2. Pengadaan barang/jasa tahun 2018.	19	20
8	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I														Menilai efektivitas pengelolaan Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP pada SMP Negeri Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I tahun 2018	Pertanggungjawaban Dana BOP	17	20
<b>B</b>	<b>PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)</b>																		
1	Pemantauan Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)														Menilai kepatuhan UKPD dalam penyusunan RUP dan mendorong UKPD untuk segera mempublikasikan RUP dalam SIRUP	Pengadaan barang dan jasa UKPD	Mengevaluasi apakah RUP yang disusun oleh SKPD/UKPD telah sesuai dengan ketentuan (dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai seperti KAK, RAB, TOR, HPS, Spesifikasi Teknis dsb)	20	20
2	Pemantauan LHKASN														Untuk menilai kepatuhan ASN dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Nomer 159 Tahun 2015 Tentang LHKASN dan Instruksi Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang LHKASN	UKPD di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja	1. Verifikasi Data pengisian LHKASN yang dilakukan oleh wajib lapor LHKASN; 2. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN terkait permasalahan dalam pengisian di Lingkungan UKPD.	19	20
3	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa														Menilai penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	UKPD dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa	April = 19 Juli = 9 Oktober = 9	20
4	Pengawasan barang persediaan semester I Tahun 2018														Meyakini pelaksanaan kegiatan penutupan barang persediaan sesuai ketentuan	Penutupan barang persediaan pada 9 UKPD	Barang persediaan berupa ATK dan obat-obatan	10	20
5	Penutupan kas akhir tahun 2018														Mengetahui realisasi penyerapan anggaran akhir tahun 2018	Kas opname dan stock opname persediaan	UKPD dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	17	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PERGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
6	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)														Menilai batasan tanggungjawab antara pejabat lama dan pejabat baru	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Pengelolaan barang; 3. Pengelolaan keuangan	19	20
7	Pengawasan atas Perintah Pimpinan														Menyelesaikan permasalahan tertentu	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	20	20
8	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus														Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan	1. Pengadaan barang dan jasa; 2. Sengketa tanah; 3. Pengelolaan keuangan; 4. Pengelolaan barang milik daerah; 5. Pengelolaan kepegawaian	UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	11	20
9	Probitas Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH														Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
10	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APiP														Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APiP	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APiP Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APiP	11	20
11	Pemantauan penyusunan RKB dan RKPBU														Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengetahui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	20	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>C PENGAWASAN LAINNYA</b>																												
1	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan														Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 tingkat Wilayah	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan									
2	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan									
3	Surveillance Pelayanan Publik														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Pelayanan Makam, PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan									
4	Pengelolaan UPG														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi	Tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan									





Lampiran III.3 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 540 TAHUN 2018

Tanggal : 16 Maret 2018

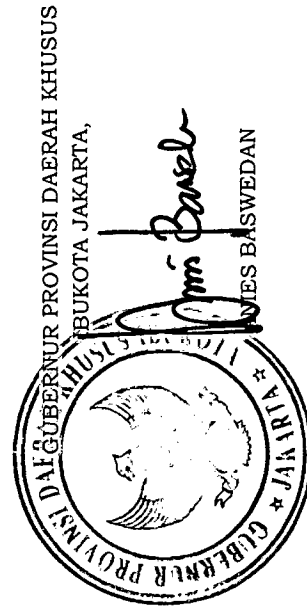
**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>A. PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>																												
1	Satuan Polisi Pamong Praja															Menilai efektifitas Penerbitan Pedagog Kaki Lima pada Trotoar	Hasil Penerbitan Pedagog Kaki Lima Tahun 2017 dan 2018	Penerbitan Pedagog Kaki Lima pada Trotoar	10	20								
2	Suku Dinas Sumber Daya Air															Menilai efektifitas saluran penghubung sungai besar	Saluran Penghubung ke aliran sungai besar	Pembangunan / Peningkatan Saluran, Saluran Penghubung, dan kelengkapannya	10	40								
3	Suku Dinas Bina Marga															Menilai efektifitas Pembangunan / Peningkatan Jalan, trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan	Pembangunan trotoar pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017	Pembangunan / Peningkatan Jalan, trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan;	10	40								
4	Sudin Perindustrian dan Energi															Menilai efektifitas Penumbuhan Wirausaha Industri Baru menunjang program Oke Oce	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Industri Tahun Anggaran 2018 (S.d Agustus 2018)	Penataan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri; Pengembangan kerjasama dan hubungan kemitraan antar industri dengan sektor ekonomi dan non ekonomi	10	20								
5	Sudin Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan															Menilai efektifitas program pembinaan dan pengembangan UKM	Felaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKM Tahun Anggaran 2018 (S.d Sep 2018)	1. Pembinaan UKM; 2. Penataan UKM; 3. Pengembangan UKM; 4. Perlindungan UKM; 5. Pembentukan Wirausaha Baru (OK OCE)	10	20								
6	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan															Menilai efektifitas dan keekonomisan pengadaan barang	Pengadaan barang belanja modal tahun 2017 dan 2018	Pengadaan barang untuk penanganan penanggulangan dan pencegahan kebakaran	10	20								



NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
9	Monitoring Kelayakan Tempat Usaha Binaan Pemda														Menilai kelayakan tempat usaha di lokasi binaan pemda	Ketersediaan fasilitas sarana/prasarana penunjang usaha	Peningkatan daya dukung usaha produktif bagi pengusaha mikro dan pedagang kaki lima	10	10		
10	Pengawasan dalam rangka penutupan kas dan persediaan akhir tahun 2018														Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang melaporkan kondisi keuangan dan barang di akhir tahun tepat waktu	Kas dan persediaan SKPD/UKPD	Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2017 pada SKPD/UKPD	20	20		
11	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa														Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepatan penyerapan/realisasi anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan/Realisasi Anggaran	20	10		
12	Pengawasan atas Current Issue dan Perintah Pimpinan														Menyelesaikan permasalahan tertentu	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	10	15		
13	Pengawasan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)														1. Menilai Batasan Tanggung Jawab antara pejabat lama dengan pejabat yang baru; 2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/saran perbaikan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan/kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan	1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Tata kelola barang; 3. Tata kelola keuangan daerah.	1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Tata kelola barang; 3. Tata kelola keuangan daerah.	10	10		
14	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus														Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	1. Pengadaan Barang/ Jasa; 2. Sengketa pertanahan; 3. Tata kelola keuangan; 4. Tata kelola Barang Milik Daerah; 5. Tata kelola Aparatur; 6. Kebijakan Administrasi Pemerintahan.	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKu, PPHP, PPBJ dan ASN lainnya	10	15		
15	Probit Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH														Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan		

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
16	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP													Meningkatkan percepatan proses tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun 2018 dan sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/saran hasil pemeriksaan	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKu, PPBJ, PPHP dan ASN lainnya	10	20
17	Pemantauan penyusunan RKB dan RKPBU													Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengetahui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	20	20
<b>C</b>	<b>PENGAWASAN LAINNYA</b>																	
1	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan													Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat Wilayah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 tingkat Wilayah	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3	Surveillance Pelayanan Publik													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Pelayanan Makam, PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota,	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4	Pengelolaan UPG													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi	Tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



Nomor : 540 TAHUN 2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN**  
**INSPEKTORAT WILAYAH PEMBANTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>A. PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>																												
1	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah															1. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawaian serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 3. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas	Tahun Anggaran 2017-2018	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawaian 5. Pencapaian Penilaian Kinerja	20	20								
2	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (3 Kecamatan)															1. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawaian serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 3. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas	Tahun Anggaran 2017-2018	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawaian 5. Pencapaian Penilaian Kinerja	20	20								

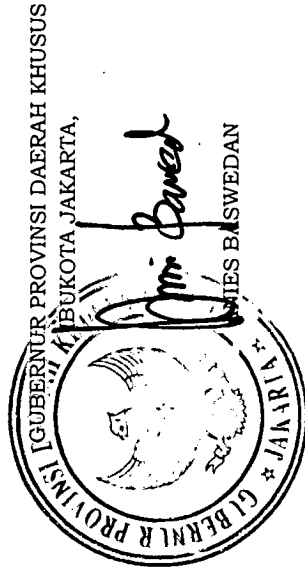
NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
3	Suku Dinas Perindustrian dan Energi														<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawaian serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif;</li> <li>2. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</li> <li>3. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas</li> </ol>	Tahun Anggaran 2017-2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Keuangan;</li> <li>2. Tata Kelola Aset/Barang;</li> <li>3. Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>4. Tata Kelola Kepegawaian</li> <li>5. Pencapaian Penilaian Kinerja</li> </ol>	8	20
4	Suku Dinas Olahraga dan Pemuda														<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawaian serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif;</li> <li>2. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</li> <li>3. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas</li> </ol>	Tahun Anggaran 2017-2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Keuangan;</li> <li>2. Tata Kelola Aset/Barang;</li> <li>3. Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>4. Tata Kelola Kepegawaian</li> <li>5. Pencapaian Penilaian Kinerja</li> </ol>	8	20
5	Suku Dinas KUMKMP														Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan UKM	Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKM Tahun Anggaran 2018 (S.d Sep 2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan UKM;</li> <li>2. Penataan UKM;</li> <li>3. Pengembangan UKM;</li> <li>4. Perlindungan UKM;</li> <li>5. Pembentukan Wirausaha Baru (OK OCE)</li> </ol>	11	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
6	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															1. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawaian serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 3. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas	Tahun Anggaran 2017-2018	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawaian; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja; 6. Community Action Plan (CAP) dan Perbaikan	8	20	
<b>B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)</b>																					
1	Pengawasan Penutupan Buku dan Stock Opname Persediaan TA.2017																Menilai/mengetahui apakah Buku Kas telah ditutup sesuai dengan ketentuan, mengetahui posisi saldo akhir tahun, Setoran Sisa Anggaran dan posisi stock opname persediaan	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Barang Persediaan	20	5
2	Pemantauan Publish RUP																Mengetahui tingkat kepatuhan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	Rencana Pengadaan TA.2018	20	20
3	Pemantauan tempat usaha Pariwisata pada 3 Kecamatan																Menilai/mengetahui ketaatan pelaku usaha Pariwisata terhadap ketentuan yang berlaku	Tempat usaha Pariwisata di 3 Kecamatan dan Sudin Pariwisata	Tempat usaha Pariwisata (Hotel, Restaurant, Hiburan)	20	20
4	Pengelolaan Dana BOP																Menilai apakah pengelolaan dana BOP-BOS telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	SD, SMP, SMA	Program/kegiatan pengelolaan dana BOP	20	20
5	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa																Menilai tingkat penyerapan anggaran serta hambatan-hambatannya	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	Tahun Anggaran 2018	20	10 x 3

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
6	Pemanfaatan aset di lingkungan sekolah														Menilai apakah pemanfaatan aset di lingkungan sekolah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Pengelolaan aset di lingkungan sekolah	Pengelolaan aset di lingkungan sekolah	20	20
7	Pengelolaan KDO pada Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Bina Marga, dan Sudin Tata Air														Menilai apakah pengelolaan KDO telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Bina Marga, dan Sudin Tata Air	Pengelolaan KDO, BBM, dan servis	20	20
8	Pengawasan Penutupan Buku dan Stock Opname Persediaan TA.2018														Menilai/mengetahui apakah Buku Kas telah ditutup sesuai dengan ketentuan, mengetahui posisi saldo akhir tahun, Setoran Sisa Anggaran dan posisi stock opname persediaan	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Barang Persediaan	20	10
9	Inspeksi Mendadak dalam rangka Pembinaan Aparatur														Mengetahui/menilai tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan yang berlaku	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	Perangkat Daerah/Unit Kerja		Menyesuaikan
10	Pengawasan atas Current Issue dan Perintah Pimpinan														Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	Perangkat Daerah/Unit Kerja		Menyesuaikan
11	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus														Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	1. Pengadaan Barang/Jasa; 2. Sengketa pertanahan; 3. Tata kelola keuangan; 4. Tata kelola Barang Milik Daerah; 5. Tata kelola Aparatur; 6. Kebijakan Administrasi Pemerintahan.	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKu, PPBP, PPBJ dan ASN lainnya		Menyesuaikan
12	Probit Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH														Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
13	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Apip														Meningkatkan percepatan proses tindak lanjut hasil pengawasan Apip tahun 2018 dan sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/ saran hasil pemeriksaan	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKu, PPBP, PPBJ dan ASN lainnya	6	Menyesuaikan
14	Pemantauan penyusunan RKB dan RKPPU														Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengetahui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	20	20



NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
C	PENGAWASAN LAINNYA																		
1	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan														Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 tingkat Wilayah	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Menyesuaikan
2	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara		Menyesuaikan
3	Surveillance Pelayanan Publik														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Pelayanan Makam, PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota,		Sesuai Kebutuhan
4	Pengelolaan UPG														Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi	Tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara		Sesuai Kebutuhan



Lampiran III.5 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 540 TAHUN 2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT WILAYAH PEMBANTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES															
<b>PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>																												
1	Satuan Polisi Pamong Praja														1. Pengawasan terhadap Penertiban Reklame, Bangunan Liar; 2. Menilai Efektifitas Pengelolaan Aset Satpol PP.	1. Papan Reklame, Bangunan Liar; 2. Pengelolaan Aset.	1. Pemasangan papan reklame apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Izin Mendirikan Bangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Penatausahaan Aset Daerah.	6	20									
2	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara														Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Persediaan dan Pengelolaan Barang Jasa	Program 2017	Pengadaan Barang Jasa	20	20									
3	Suku Badan Aset Daerah.														Pengawasan pengelolaan dan Inventarisasi Aset.	Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan.	Penatausahaan dan Inventarisasi Aset Daerah	7	20									
4	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah.														Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.	Data Pajak Hotel dan Restoran di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.	Data Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang tercatat di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah.	7	20									
5	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara.														1. Menilai Efektifitas dan keekonomisan pengelolaan dana BOP; 2. Menilai apakah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Efektif Ekonomi dan Efisien.	1. Pengelolaan dana BOP; 2. Pengadaan Barang / Jasa tahun 2017.	1. Pengelolaan dana BOP; 2. Pengadaan Barang / Jasa tahun 2017.	6	20									

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
6	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian														Menilai efektivitas dalam rangka pencapaian ketersediaan kecukupan pangan	1. Kontribusi pangan dari BUMD terkait 2. Program terkait dengan Kontribusi pangan	1. Kebijakan dan program dalam rangka pencapaian ketersediaan kecukupan pangan; 2. PKS dengan daerah lain pemasok pangan untuk DKI Jakarta.	6	20
7	Suku Dinas Perindustrian dan Energi														1. Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah; 2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dan kegiatan industri, energi dan ketenagalistrikan, geologi dan air tanah serta pencahayaan kota lingkup Kota Administrasi.	1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Industri Tahun Anggaran 2018 (Januari s.d Juli 2018); 2. Pelaksanaan Pengembangan Kerjasama dan Membangun Hubungan Kemitraan antar Industri.	1. Tercapainya Penataan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri; 2. Tercapainya Pengembangan Kerjasama dan Hubungan Kemitraan antar Industri dengan Sektor Ekonomi dan Non Ekonomi (ekonomi kreatif).	7	20
8	Pengadaan Barang/Jasa pada 3 Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara														1. Menilai dan Mengevaluasi Efektivitas penatausahaan Barang Persediaan; 2. Menilai apakah pelaksanaan Barang/Jasa Efektif, Ekonomis dan Efisien	1. Pengelolaan Barang persediaan; 2. Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017	1. Pengelolaan Barang persediaan; 2. Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017.	6	20
9	Suku Dinas Kesehatan														1. Menilai Efektivitas Pengawasan terhadap perizinan dan pelayanan Kesehatan. 2. Menilai Efektivitas Pengendalian Pencapaian Standarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Baik Pemerintah Baik Pemerintah maupun Swasta	1. Pengawasan terhadap perizinan dan pelayanan Kesehatan Tahun 2017; 2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Baik Pemerintah maupun Swasta Tahun 2017	1. Pengelolaan dan Pelayanan Perizinan Penyedia Jasa Kesehatan; 2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Baik Pemerintah maupun Swasta	6	20
10	Suku Dinas KUMKMP														Menilai efektivitas program pembinaan dan pengembangan UKM	Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKM Tahun Anggaran 2018 (S.d Sep 2018)	1. Pembinaan UKM; 2. Penataan UKM; 3. Pengembangan UKM; 4. Perlindungan UKM; 5. Pembentukan Wirausaha Baru (OK OCE)	11	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
11	Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman														1. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian / Pengawasan dan Bimbingan teknis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. Menilai efektifitas Community Action Plan (CAP) dan Perbaikan	Pembangunan Gedung di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Efektivitas Community Action Plan (CAP) dan Perbaikan	1. Pengelolaan dan pemanfaatan; 2. Community Action Plan (CAP) dan Perbaikan	6	20
12	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.														1. Menilai Efektifitas dan keekonomisan pengelolaan dana BOP; 2. Menilai apakah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Efektif Ekonomi dan Efisien	1. Pengelolaan dana BOP; 2. Pengadaan Barang / Jasa tahun 2017.	1. Pengelolaan dana BOP; 2. Pengadaan Barang / Jasa tahun 2017.	6	20

B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERPENTU (PDTT)																			
1	Pemantauan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)														Menilai kepatuhan UKPD dalam penyusunan RUP dan mendorong UKPD untuk segera mempublikasi RUP dalam SIRUP	Pengadaan barang dan jasa UKPD	Mengevaluasi apakah RUP yang disusun oleh UKPD telah sesuai dengan ketentuan (dileengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai seperti KAK,RAB,TOR,HPS,Spesifikasi Teknis dsb)	17	20
2	Pemantauan LHKASN														Untuk menilai kepatuhan ASN dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Nomer 159 Tahun 2015 Tentang LHKASN dan Instruksi Gubernur Nomer 88 Tahun 2017 Tentang LHKASN	UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu: - Dinas dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; - Walikota Administrasi Jakarta Pusat beserta Kecamatan dan Kelurahan; - Walikota Administrasi Jakarta Timur beserta Kecamatan dan Kelurahan; - Dinas dan Suku Dinas Perhubungan; - Dinas dan Suku Dinas Pendidikan; - UPT Taman Margasatwa Ragunan.	1. Verifikasi Data pengisian LHKASN yang dilakukan oleh wajib lapor LHKASN; 2. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN terkait permasalahan dalam pengisian di Lingkungan SKPD/UKPD.	5	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
3	Monitoring alat Kesehatan pada PKM Kecamatan															Monitoring Pengadaan Alat Kesehatan pada 6 (enam) PKM	Penyaluran Alat Kesehatan pada PKM Kelurahan	1. Tata Kelola Barang/Jasa 2. Barang Inventaris	19	20
4	Pengawasan Stock Opname Barang Persediaan semester I T.A 2018															Menilai apakah pengelolaan barang persediaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Barang Persediaan	20	10
5	Pengawasan atas aset pada Suku Dinas Olah Raga dan Pemuda															1. Menilai apakah seluruh aset sudah masuk kedalam KIB; 2. Meyakini seluruh Retribusi telah di sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Seluruh Aset Gedung yang dikelola untuk Umum	Barang Inventaris	12	20
6	Tutup Buku Pada para UKPD															Mengetahui realisasi penyerapan anggaran akhir tahun 2018	Cash opname dan stock opname	UKPD	20	10
7	Pengawasan Pendampingan dalam Rangka Penutupan buku dan Stock Opname Barang persediaan Tahun Anggaran 2018															1. Menilai apakah pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Menilai apakah pengelolaan barang persediaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Tata Kelola keuangan; 2. Barang Persediaan.	20	10
8	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa															Untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	UKPD dilingkungan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	Data Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	16	10
9	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan															Mengetahui batas tanggung jawab Pimpin lama dan yang baru	UKPD dilingkungan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengelolaan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	5	10
10	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus															Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	UKPD dilingkungan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPHP dan ASN di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara .	5	10

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
11	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan AP/PP													Meningkatkan percepatan proses tindak lanjut hasil pengawasan AP/PP tahun 2018 dan sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/saran hasil pemeriksaan	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKeu, PPBJ, PPHP dan ASN lainnya	5	10
12	Pengawasan atas Current Issue dan Perintah Pimpinan													Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Utara	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
13	Proby Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH													Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
14	Pemantauan penyusunan RKB dan RKPBU													Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengetahui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	20	20
<b>C PENGAWASAN LAINNYA</b>																		
1	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan													Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 tingkat Wilayah	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Menyesuaikan	
2	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Menyesuaikan	
3	Surveillance Pelayanan Publik													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Pelayanan Makam, FTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4	Pengelolaan UPG													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi	Tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



Lampiran III.6 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 540 TAHUN 2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
<b>A. PENGAWASAN KINERJA / REGULER</b>																			
1	Suku Dinas Sumber Daya Air																Pembangunan dan Pemeliharaan tanggul, breakwater dan IPAL	15	20
2	Suku Dinas Perhubungan																Pembangunan dan Pemeliharaan dermaga dan integrasi transportasi perairan, kolam labuh dan alur	15	20
3	Suku Dinas Kesehatan																Pengendalian penyakit menular dan pencegahan NAPZA serta operasional kapal dan kendaraan roda dua	15	20
4	Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan																Kegiatan perawatan transplantasi karang dan padang lamun, sarana docking kapal dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	8	20
5	Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik																Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	15	20
6	UP Pelayanan Terpadu Satu Pintu																Pelayanan perizinan dan non perizinan rumpun ketatarungan, kajian lingkungan, pembangunan dan kelainan bangunan.	15	20

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)																	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
B	Monitoring publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)														Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta mendorong SKPD/UKPD mempublish RUP ke dalam SIRUP	RUP Pengadaan barang dan jasa SKPD/ UKPD	Mengevaluasi identifikasi kebutuhan, pemakatan pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, pencetakan spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa serta organisasi pengadaan	8	15
1	Monitoring pencertiban reklame, termak kerang hijau dan bagan tancap														Evaluasi atas kegiatan penertiban reklame, pertamakan kerang hijau dan bagan tancap	Reklame, pertamakan kerang hijau dan bagan tancap di lingkungan Kab. Adm. Seribu	Reklame, pertamakan kerang hijau dan bagan tancap di lingkungan Kab. Adm. Seribu	12	15
2	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa														Untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD/UKPD	Data Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa	7	10
3	Monitoring Aset Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017														Menilai pengelolaan aset Suku Dinas Lingkungan Hidup Kab. Adm. Kep. Seribu yang berasal dari Kantor LH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta	Aset penggabungan dari Kantor LH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta	Serah terima Aset penggabungan dari Kantor LH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta	15	15
4	Pengawasan dalam Rangka Penutupan Barang Persediaan Semester I TA 2017														Pengurus Barang melaporkan barang persediaan tepat waktu	SKPD/UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Ketepatan penatausahaan barang	7	10
5	Pemantauan Pelaksanaan BOS/BOP														Menilai proses pelaksanaan BOS/BOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Proses Pelaksanaan BOS/BOP pada SDN, SMPN, di Lingkungan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu TA 2018	Penggunaan BOS/BOP berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	15	15
6	Monitoring Kapal Sampah dan Aset Germor yang diserahkan ke Kelurahan														Menilai operasional kapal sampah dan pelaksanaan serah terima aset germor	Kapal sampah dan aset germor	Operasional kapal sampah dan pelaksanaan serah terima aset germor dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta ke Kelurahan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	15	10
7	Monitoring Kampung Wisata Tematik dan Obyek Ekowisata Kepulauan														Menilai progres pembangunan Kampung Wisata Tematik dan Obyek Ekowisata Kepulauan	1. Kampung Wisata Tematik; 2. Obyek Ekowisata Kepulauan	1. Kampung Wisata Tematik; 2. Obyek Ekowisata Kepulauan	15	15



NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
9	Pendampingan Pengawasan dalam Rangka Penutupan Kas Akhir Tahun 2017														Meyakini saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2017	Kas dan Persediaan	Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD	15	10
10	Pengawasan dalam Rangka Penutupan Kas Akhir Tahun, barang persediaan dan aset Tahun Anggaran 2017														Meyakini saldo kas, persediaan dan aset akhir tahun anggaran 2017	Kas dan Persediaan dan aset	Untuk menentukan saldo kas, persediaan dan aset akhir tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD	15	10
11	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)														<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai Batasan Tanggung Jawab antara pejabat lama dengan pejabat yang baru;</li> <li>2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/saran perbaikan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan/kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kepegawaian;</li> <li>2. Pengelolaan barang milik daerah;</li> <li>3. Pengelolaan keuangan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kepegawaian;</li> <li>2. Tata kelola barang</li> <li>3. Tata kelola keuangan daerah.</li> </ol>	8	10
12	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APJP														Meningkatkan percepatan proses tindak lanjut hasil pengawasan APJP tahun 2018 dan sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/saran hasil pemeriksaian	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKu, PPBJ, PPHP dan ASN lainnya	7	10
13	Pengawasan atas Current Issue dan Perintah Pimpinan														Menyelesaikan permasalahan tertentu	Kabupaten Administrasi	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	15	15
14	Proby Audit proses PBJ dalam rangka pelaksanaan KORSUPGAH														Menilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses PBJ	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
15	Pemantauan LHKASN														Menilai kepatuhan ASN dalam melaksanakan Peraturan Gubernur No. 159 Tahun 2015 dan Instruksi Gubernur No. 88 Tahun 2017	SKPD/UKPD di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu : - PKM Seribu Utara - PKM Seribu Selatan - Kelurahan - Sudin Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASN yang belum lapor</li> <li>2. Verifikasi data</li> </ol>	3	15

NO	URAIAN /PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
16	Pemantauan penyusunan RKBU dan RKPB														Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengetahui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	12	20
<b>C</b>	<b>PENGAWASAN LAINNYA</b>																		
1	Pelaksanaan Konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan													Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 tingkat Wilayah	Perangkat daerah/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
2	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
3	Surveillance Pelayanan Publik													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa pungutan liar	Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar tahun 2018 tingkat Wilayah	Pelayanan Makam, PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
4	Pengelolaan UPG													Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi	Tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi tahun 2018 tingkat Wilayah	Aparatur Sipil Negara	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	

